



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur:
Pencapaian Stabilitas Keamanan Kawasan

Skripsi

Oleh

Ivan Samuel Alvarta

2014330142

Bandung
2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur:
Pencapaian Stabilitas Keamanan Kawasan**

Skripsi

Oleh

Ivan Samuel Alvarta

2014330142

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung
2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ivan Samuel Alvarta
Nomor Pokok : 2014330142
Judul : Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur: Pencapaian Stabilitas
Keamanan Kawasan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 12 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.


: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ivan Samuel Alvarta

NPM : 2014330142

Jurusan/Program studi: Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur:

Pencapaian Stabilitas Keamanan Kawasan

Dengan ini menyatakan bahwa seminar ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan akademik yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Januari 2018



Ivan Samuel Alvarta

2014330142

ABSTRAK

Nama : Ivan Samuel Alvarta
NPM : 2014330142
Judul : Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur:
Pencapaian Stabilitas Keamanan Kawasan

Instabilitas yang ada di antara negara-negara eks-Uni Soviet dan Blok Timur setelah berakhirnya Perang Dingin, mendefinisikan wajah kawasan Eropa Timur. Instabilitas muncul setelah negara-negara tersebut memerdekakan diri dari Uni Soviet. NATO melihat bahwa stabilitas kawasan Eropa Timur dapat dicapai melalui perluasan keanggotaan. Potensi konflik diharapkan berkurang dan stabilitas keamanan di kawasan Eropa Timur dapat tercapai. Akan tetapi, setelah perluasan keanggotaan ke Eropa Timur, konflik tetap ada dan stabilitas kawasan belum sepenuhnya tercapai.

Untuk memahami pencapaian stabilitas kawasan Eropa Timur yang diraih NATO melalui perluasan keanggotaannya, penelitian kualitatif ini menggunakan *Regional Security Complex Theory* dan *Democratic Peace Theory*. Terdapat tiga temuan terhadap rumusan masalah. Pertama, dinamika kompleksitas kawasan Eropa Timur berpola *enmity* atau permusuhan. Kedua, pencapaian stabilitas melalui perluasan keanggotaan NATO baru tercapai pada dinamika berpola *amity* di antara negara-negara anggota NATO dan negara demokrasi non-anggota. Temuan ketiga yang berhubungan dengan temuan kedua adalah status Rusia sebagai *great power* di Eropa Timur menyebabkan perluasan anggota NATO tidak dapat menjangkau seluruh negara di kawasan.

Kata kunci: Eropa Timur, NATO, Rusia, *open door policy*, stabilitas, *enmity*, *democratic peace*

ABSTRACT

Name : Ivan Samuel Alvarta
Student Number : 2014330142
Judul : NATO Membership Enlargement to Eastern Europe: The
Achievement of Regional Security Stability

The existence of instability within former Soviet and Eastern Bloc countries after Cold War ended, describe the image of Eastern Europe. Instability occurs after those countries declared independence following the disintegration of Soviet Union. NATO sees that stability and security in Eastern Europe can only be achieved through NATO membership enlargement or known as open door policy. It is believed that the possibility of conflict can be reduced and regional stability in Eastern Europe could be achieved. However, after the current enlargement to Eastern Europe, conflict still exists and regional stability is not yet to achieve.

To understand how far the achievement of regional stability through NATO enlargement to Eastern Europe, this qualitative research utilizes Regional Security Complex Theory and Democratic Peace Theory. This research resulted in three specific findings to answer the question. Firstly, the dynamics of regional security complex in Eastern Europe leaning toward enmity. Secondly, the achievement of stability through membership enlargement, which resulted in the dynamics of amity, is so far only achieved in particular relations between NATO member countries and non-NATO democratic countries. The third finding is correlated with aforementioned finding that the status of Russia as great power in the region limits NATO effort to enlarge the membership throughout the region.

Keywords: Eastern Europe, NATO, Russia, stability, open door policy, enmity, democratic peace

KATA PENGANTAR

Skripsi yang penulis susun ini berjudul **“Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur: Pencapaian Stabilitas Keamanan Kawasan”**. Latar belakang penulis memilih judul ini adalah ketertarikan penulis untuk menemukan sejauhmana pengaruh perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur di dalam menciptakan stabilitas kawasan.

Berbekal proses pembelajaran yang penulis tempuh pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, maka maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah membangun kemampuan dan ketrampilan memahami persoalan instabilitas keamanan di kawasan Eropa Timur. Pada tahap selanjutnya penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan masukan berdasarkan analisis yang dilaksanakan.

Diharapkan penelitian atau penulisan skripsi ini memberikan sumbangsih yang berharga bagi wawasan pemikiran di bidang sosial politik internasional, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik internasional di Eropa Timur.

Pertama-tama tentunya penulis berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang Mahakasih dan Mahakuasa yang memungkinkan penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan berupa skripsi ini. Banyak terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua serta keluarga yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Banyak terima kasih penulis sampaikan kepada Mas Idil Syawfi, S.IP., M.Si. yang telah mengarahkan penulis. Banyak terima kasih kepada Tim Dosen Penguji yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil penelitian ini.

Penulis memohon maaf atas tiap kekurangan yang mungkin ditemukan di dalam skripsi ini. Keterbatasan ini penulis anggap menjadi tekad untuk terus melanjutkan proses pembelajaran yang sudah diterima, mengingat betapa masih luasnya pengetahuan yang bisa diteliti, dan diharapkan akan membuahkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umat manusia di masa mendatang.

Wasalam,

Bandung, 8 Januari 2018

Ivan Samuel Alvarta

UCAPAN TERIMA KASIH

- Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya melalui penyertaan-Nya dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melewati proses yang cukup panjang. Melalui proses penulisan ini, penulis memperoleh pelajaran untuk selalu rendah hati dan bersandar kepada-Nya. Pertolongan-Nya nyata dan tidak pernah terlambat;
- Skripsi ini juga dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis, Suki Satja dan Hana Christina. Dukungan dan doa menyertai penulis selama 3,5 tahun menempuh studi Hubungan Internasional yang dipenuhi tantangan. Kesabaran dan teguran mereka menghadapi proses penulisan skripsi yang acapkali terhambat oleh banyak hal menjadi dorongan bagi penulis. Akhirnya, penulis lulus dan memperoleh gelar sarjana. Tidak lupa, skripsi ini juga dipersembahkan kepada adik penulis, Destin C.L. yang selalu mendukung dan menghibur penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
- Terima kasih kepada Mas Idil Syawfi, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi. Beliau banyak memberikan masukan dan perhatian terhadap skripsi ini. Besar terima kasih untuk toleransi dan kesabaran beliau menanggapi pengerjaan skripsi ini yang tergolong lambat;
- Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada alm. Mbak Diandra Dewi, S.IP., M.Sc., salah satu dosen KBI 1 Politik dan Keamanan yang banyak berbagi pengalaman dan wawasan dengan penulis selama menempuh studi. Juga beliau mempercayakan tanggung jawab kepada penulis untuk membantu di kepanitiaan mata kuliah Praktik Diplomasi pada tahun 2015 dan 2016. Segala kebaikan Mbak Diandra pasti dibalaskan lebih oleh Yang Maha Kuasa. Mohon maaf penulis sampaikan kepada beliau karena berhalangan mengantar ke peristirahatan terakhirnya;
- Terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Pdt. Dr. Bambang Widjaja, Pdt. Juliono Wijaya, dan Pdt. Jan yang mendukung penulis dari awal menempuh studi Hubungan Internasional hingga mencapai kelulusan. Tuhan memberkati

atas semua kebaikan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga semakin berbuah dan diberkahi kesehatan jasmani serta rohani dalam melayani;

- Teruntuk kawan terdekat penulis, baik yang bersama-sama melalui skripsi dan yang di kemudian hari akan mengerjakan skripsi, yakni Ali Syariati, Alrafsya, Anthony Marwan, Berlinda Nefertiti G.S., Bobby Hizkia, Celica Andini, Daniel Tantra, Farhan Yunas, James Krisnanda, Kevin Ferriane, Michael Putra, Natanael Alvin, Praditia Agung, dan Teresa Retno; penulis mengucapkan banyak terima kasih Juga dihaturkan terima kasih kepada kawan-kawan di Chand++ yang menemani keseharian penulis di kampus selama perkuliahan;
- Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada KSMPMI dan PEDS yang telah banyak membantu mengembangkan potensi penulis dan tempat bagi penulis untuk menimba pengalaman berorganisasi. Salam untuk kalian.
- Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang belum sempat disebutkan namanya, yang telah mendukung penulis selama proses perkuliahan hingga akhir. Semoga skripsi yang telah diselesaikan ini bermanfaat bagi para pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
1. BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1. Pembatasan Masalah.....	5
1.2.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kajian Literatur.....	6
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20
2. BAB II. PERLUASAN KEANGGOTAAN NATO KE EROPA TIMUR.....	22
2.1 Instabilitas Eropa Timur.....	27
2.2 <i>Open Door Policy NATO</i>	41
2.2.1 Pendekatan NATO terhadap Eropa Timur.....	48
2.2.2 Pendekatan NATO terhadap Rusia.....	53

2.3 Respon Rusia terhadap Perluasan Keanggotaan NATO.....	61
3. BAB III. DAMPAK PERLUASAN KEANGGOTAAN NATO TERHADAP STABILITAS EROPA TIMUR.....	65
3.1 Dinamika Kompleksitas Keamanan Kawasan Eropa Timur.....	65
3.2 Bentuk Hubungan <i>Enmity</i> di Eropa Timur.....	72
3.2.1 Pengaruh <i>Democratic Peace</i> terhadap <i>Enmity</i> di Eropa Timur.....	76
3.3 Bentuk Hubungan <i>Amity</i> di Eropa Timur.....	78
3.4 Pencapaian NATO dalam Menciptakan Stabilitas Kawasan Eropa Timur.....	82
4. BAB IV. KESIMPULAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 2.1. Perbandingan Fungsi dan Kepentingan NATO Ketika dan Setelah Perang Dingin.....	23
Tabel 2.2. Perluasan Keanggotaan NATO.....	41
Tabel 2.3. Kerja Sama dan Perjanjian yang Dibuat dibawah NRC.....	56
Tabel 3.3. Perbandingan Kohesivitas Organisasi Kawasan di Eropa Timur.....	79

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
BSP	: <i>Bulgarian Socialist Party</i>
CEI	: <i>Central European Initiative</i>
CIS	: <i>Commonwealth of Independent States</i>
CSCE	: <i>Commission of Security and Cooperation in Europe</i>
DPT	: <i>Democratic Peace Theory</i>
EEU	: <i>Eurasian Economic Union</i>
EU	: <i>European Union</i>
GUAM	: <i>Georgia Ukraine Azerbaijan Moldova</i>
HAM	: Hak Azasi Manusia
MAP	: <i>Membership Action Plan</i>
NAC	: <i>North Atlantic Council</i>
NACC	: <i>North Atlantic Cooperation Council</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NRC	: <i>NATO-Russia Council</i>
OSCE	: <i>Organization of Security and Co-Operation in Europe</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PfP	: <i>Partnership for Peace</i>
PJC	: <i>Permanent Joint Council</i>
RPA	: <i>Republican Party of Armenia</i>
RSCT	: <i>Regional Security Complex Theory</i>
STANAG	: <i>Standardization Agreement</i>
TLE	: <i>Treaty of Limited Equipment</i>
UDF	: <i>Union of Democratic Forces</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin yang diikuti disintegrasi Uni Soviet dan jatuhnya Blok Timur tidak membuat relevansi NATO sebagai aliansi pertahanan berakhir. Nyatanya, secara prinsipal, Artikel 5 *Washington Treaty* masih aktif dan hingga kini NATO tidak hanya terbatas pada aliansi pertahanan yang berfungsi melindungi negara anggotanya, akan tetapi juga termasuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Eropa dengan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi dan HAM terhadap negara-negara bukan anggota NATO yang notabene masih dalam transisi pemerintahan dari otoriter ke demokrasi. Dalam kasus ini, NATO memperluas pengaruhnya hingga ke negara di kawasan Eropa Timur yang sempat menjadi bagian Uni Soviet.

Perluasan tersebut dikenal dengan kebijakan “*open door policy*” yang berdasarkan pada Artikel 10 Perjanjian Atlantik Utara yang berbunyi, “*European state in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area*”. Berdasarkan pasal tersebut, perluasan keanggotaan ini diyakini mampu meningkatkan kerjasama dan kohesi untuk berkontribusi kepada keamanan kawasan Atlantik Utara.¹ Tercatat dalam kronologi sejarah, perluasan anggota NATO diawali dari terdافتarnya Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia (1999); Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania,

¹ NATO, “Enlargement”, diakses 16 Februari 2017, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49212.htm

Rumania, Slovakia, Slovenia (2004); Albania dan Kroasia (2009), dan Montenegro (2017).²

Perluasan keanggotaan NATO hingga ke negara-negara eks-Uni Soviet di kawasan Eropa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan kawasan ternyata justru berdampak terhadap konstelasi kawasan, terutama berkaitan dengan respons Rusia terhadap kebijakan NATO dalam hal tersebut. Rusia yang ketika Perang Dingin adalah pusat kendali pemerintahan Uni Soviet menanggapi kebijakan perluasan keanggotaan NATO hingga ke kawasan Eropa Timur yang memiliki kedekatan geografis dengan Rusia dengan reaksi keras. Pemerintah Rusia beranggapan bahwa NATO telah merusak janji NATO ketika menjelang akhir Perang Dingin, yaitu untuk tidak memperluas pengaruhnya hingga ke perbatasan Rusia, khususnya terhadap negara-negara dengan identitas *post-Soviet*.

Selain bertambahnya peran NATO pada aspek *soft power*, NATO meningkatkan kapasitasnya dalam menjaga keamanan kawasan berupa kerja sama latihan militer bersama yang rutin diadakan termasuk dengan operasi militer dan kemanusiaan, di dalam dan di luar kawasan Eropa, seperti misi Afghanistan, intervensi kemanusiaan pada Krisis Kosovo, operasi anti-pembajakan Teluk Aden dan Tanduk Afrika, dan operasi lainnya yang juga melibatkan organisasi lain.³

² NATO, "Member countries", diakses 16 Februari 2017, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49212.htm

³ NATO, "Operations and missions: past and present", diakses 16 Februari 2017, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm

Hasil dari perluasan keanggotaan NATO adalah penambahan jumlah anggota dari yang awalnya berjumlah 12 negara anggota kini telah mencapai 29 negara anggota. Tambahan keanggotaan tersebut mayoritas berasal dari negara eks-Uni Soviet dan eks-Yugoslavia.

Hingga kini belum ditemukan fakta yang mendukung klaim pemerintah Rusia tentang NATO yang mengingkari janjinya untuk tidak memperluas keanggotaannya hingga mencapai perbatasan Rusia. NATO tidak pernah merasa berjanji untuk tidak akan memperluas keanggotannya lagi. Yang jelas, Rusia menggunakan klaim tersebut untuk meningkatkan kapabilitas dan aktivitas militernya yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap negara anggota NATO dan tindakan intimidatif terhadap negara yang berniat menjadi anggota NATO.⁴

1.2. Identifikasi Masalah

Kondisi negara-negara di Eropa Timur dewasa ini dapat merefleksikan wajah kawasan Eropa Timur yang menunjukkan instabilitas, baik dalam konteks domestik maupun hubungan antar-negara. Spektrum sistem pemerintahan di Eropa Barat dengan Eropa Timur cukup kontras, hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan di Eropa Barat yang demokratis berbanding lurus dengan kemandirian ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Berbeda dengan sistem pemerintahan di Eropa Timur, masih ada negara-negara yang dipimpin secara otoriter, menyebabkan perkembangan politik domestik dan ekonomi yang tidak kondusif, seperti korupsi dan krisis politik, kemiskinan seperti yang terjadi

⁴ NATO, "NATO enlargement and Russia: myths and realities", diakses 16 Februari 2017, <http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Nato-enlargement-Russia/EN/index.htm>

di Ukraina dan Georgia yang menghadapi instabilitas politik dan resesi ekonomi sekaligus di tahun 2000 hingga sekarang.⁵

Hal yang serupa terjadi dalam konteks hubungan internasional di kawasan, konflik di perbatasan yang melibatkan kekuatan bersenjata dan tindakan yang melanggar kedaulatan negara menghambat stabilitas dan perdamaian kawasan. Beberapa kasus penting di kawasan Eropa Timur seperti krisis Ossetia Selatan-Abkhazia, konflik perbatasan Armenia-Azerbaijan, dan revolusi di Ukraina yang berlanjut pada aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia.

Fenomena yang terjadi di Eropa Timur tidak terlepas dari kondisi Uni Soviet ketika Perang Dingin, dimana negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari satelit besar Uni Soviet amat tergantung secara ekonomi dan birokrasi.⁶ Keadaan yang kemudian berbeda ialah ketika negara-negara tersebut secara resmi menjadi negara yang merdeka. Ketidaksiapan politik akibat ketergantungan terhadap bantuan asing dan pembagian teritori yang kurang jelas menyebabkan situasi domestik dan regional amat sulit mencapai perdamaian. Belum lagi, ditambah peran Rusia di era *post-Soviet* yang berambisi memperluas cakupan pengaruhnya ikut menambah dinamika kawasan. Eropa Timur yang terletak di benua Eropa tentu akan menjadi perhatian bagi NATO, tidak hanya untuk memberi keamanan dan stabilitas Eropa Barat dan sekitarnya, tetapi juga Eropa Timur yang dinamikanya dapat berpengaruh dalam aspek politik,

⁵ EurActiv.com, "Eastern Europe Gripped with Political Instability", diakses 16 februari 2017, <http://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eastern-europe-gripped-by-political-instability/>

⁶ Charles S. Gochman dan James Lee Ray, "Structural Disparities in Latin America and Latin Europe 1950-1970", Sage Journal, diakses 17 Februari 2017, <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002234337901600304>

keamanan, dan ekonomi ke kawasan terdekatnya. Kebijakan NATO tersebut juga didukung oleh negara di Eropa Timur seperti Armenia, Ukraina dan Moldova yang tertarik untuk bergabung dengan NATO.

Namun, NATO menghadapi kesulitan dalam menciptakan stabilitas. Selain masalah Rusia, juga negara-negara di Eropa Timur seperti Ukraina dan Georgia terhambat oleh konflik perbatasan. Masalah tersebut memunculkan pertanyaan sejauh mana pencapaian stabilitas kawasan Eropa Timur dapat tercapai melalui perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan masalah pada konteks perluasan anggota yang dilakukan NATO ke kawasan negara-negara yang pernah di bawah pengaruh maupun menjadi bagian Uni Soviet dan bagaimana keputusan tersebut dapat dipahami untuk menciptakan stabilitas kawasan dari sudut pandang NATO sebagai aktor utama. Negara-negara yang dianalisis adalah negara di Eropa Timur yang telah menjadi anggota NATO pada tahun 2017 dan negara yang masih dalam proses negosiasi sebab negara-negara tersebut terhambat oleh kehadiran Rusia yang menolak perluasan keanggotaan NATO. Titik berat analisis penulis ada pada pencapaian-pencapaian yang dapat diperoleh dalam kebijakan NATO untuk menstabilkan kawasan Eropa Timur.

1.2.2. Perumusan Masalah

Bagaimana pencapaian stabilitas kawasan keamanan Eropa Timur melalui perluasan keanggotaan NATO?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan sejauh mana stabilitas yang dicapai NATO di Eropa Timur.
2. Memperoleh gambaran *regional security complex* di Eropa Timur yang berpola *enmity*.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi referensi tambahan bagi kajian keamanan di Eropa Timur.
2. Menambah wawasan penstudi HI dalam memahami dinamika kawasan Eropa Timur berdasarkan *Regional Security Complex Theory*.

1.4. Kajian Literatur

Literatur pertama berjudul “*East European Security after the Cold War*” Bab 2 tentang “*Eastern Europe’s Changing Security Environment*” oleh Stephen Larrabee pada tahun 1993 menjelaskan perubahan pada konstelasi keamanan regional Eropa Timur, khususnya setelah akhir Perang Dingin yang ditandai

kejatuhan komunisme. Larrabee berargumentasi bahwa meskipun negara-negara di Eropa Timur menghadapi dilema, bahwa baik mendekat ke Rusia ataupun NATO memiliki konsekuensinya terhadap keamanan masing-masing negara, pilihan untuk mendekat ke NATO adalah hal yang paling rasional.⁷ Pilihan tersebut, juga dipertegas dengan keberadaan AS yang vital bagi NATO. AS dinilai sebagai satu-satunya negara yang mampu membuat NATO menjadi organisasi yang relevan lewat kepemimpinannya.⁸

Apabila Larrabee mengkaji peran AS dan dampak yang ditimbulkan apabila negara-negara Eropa Timur bergabung ke NATO, Charles K. Kupchan di dalam tulisannya "*Explaining NATO Enlargement*" bagian IV mengenai "*Domestic Politics and National Interest*" dengan sub-bagian "*The Origins and Future of NATO Enlargement*", membawa kajian yang lebih mendalam mengenai stabilitas yang didapat Eropa Timur dengan bergabung ke NATO dan kapabilitas NATO sebagai aliansi keamanan di kawasan. Kupchan seolah memberikan tambahan perspektif Rusia terhadap keberadaan AS di NATO yang dianggap mengambil alih tanggung jawab negara-negara Eropa.⁹ Dengan demikian, Kupchan menekankan signifikansi peran negara-negara Eropa di dalam NATO untuk menciptakan stabilitas dan keamanan Eropa.¹⁰ Kelemahan tulisan Kupchan terbatas pada penjelasan kapabilitas, bukan pencapaian yang diperoleh apabila NATO menjalankan peran sesuai kapabilitasnya.

⁷ F. Stephen Larrabee, "East European Security after Cold War", 1993, Santa Monica: RAND

⁸ Ibid.

⁹ Charles K. Kupchan, "The Origins and Futures of NATO Enlargement" (Explaining NATO Enlargement), 2013, Taylor and Francis

¹⁰ Ibid.

Kedua literatur tersebut lebih banyak membahas apa yang dapat NATO lakukan dan bagaimana negara-negara Eropa Timur seharusnya mengarahkan orientasi politik luar negerinya. Tulisan Robert J. Art yang berjudul “Creating a Disaster: NATO’s Open Door Policy” pada tahun 1998 mengisi bagian kritis mengenai relevansi NATO dan manfaat kebijakan perluasan NATO kebijakan perluasan keanggotaan ke Eropa Timur yang tidak disentuh oleh kedua literatur yang telah dibahas sebelumnya. Art berargumentasi bahwa fungsi NATO mungkin akan berubah seiring penambahan jumlah anggota.¹¹

Art menambahkan potensi Rusia untuk bergabung dengan NATO yang dianggapnya kecil dan tidak memberikan dampak positif bagi NATO. Kesimpulan dalam literturnya adalah penghentian penambahan jumlah anggota NATO dan mengintegrasikan Rusia ke dalam NATO.¹² Dengan cara tersebut, NATO masih akan tetap berdiri sebagai aliansi keamanan kolektif yang relevan dan mampu menciptakan stabilitas dengan melibatkan Rusia.

Berbeda dengan Art dan kedua literatur sebelumnya yang lebih berpihak kepada salah satu sisi dan menghasilkan kesimpulan berupa rekomendasi tindakan, Andrew Kydd di dalam tulisannya yang berjudul “*Trust Building, Trust Breaking: The Dilemma of NATO Enlargement*” mengangkat debat dilematis perluasan keanggotaan NATO dalam konteks pembangunan kepercayaan di antara negara-negara Eropa Timur. Ia menyatakan perluasan keanggotaan NATO diperlukan untuk menciptakan kepercayaan di antara negara-negara Eropa Timur

¹¹ Robert J. Art, “Creating a Disaster: NATO’s Open Door Policy”, 1998, The Academy of Political Science

¹² Ibid.

dan mengkritik pernyataannya sendiri bahwa perluasan tersebut akan merusak kepercayaan yang telah dibentuk NATO dan Rusia.¹³

Berbeda dengan Art, ia tidak memberikan alternatif bagaimana NATO dapat berlaku adil terhadap negara-negara yang ingin bergabung ke NATO dan Rusia. Kydd juga tidak berharap NATO dapat melakukan pendekatan khusus kepada Rusia. Kydd menilai bahwa apa yang dilakukan NATO sudah cukup terkait dengan penetapan syarat-syarat yang membatasi negara-negara untuk bergabung dengan NATO untuk mengurangi kekhawatiran dan ketidakpercayaan Rusia terhadap NATO.¹⁴

Sementara itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya kajian terhadap NATO seharusnya dilakukan secara menyeluruh karena NATO merupakan sebuah aliansi keamanan kolektif. Oleh sebab itu, penentuan negara mana yang dominan di dalam NATO untuk menciptakan stabilitas kawasan Eropa telah membuat NATO sebagai aliansi yang tidak relevan.

Kedua, penulis menyadari kapabilitas NATO, tetapi pencapaian stabilitas kawasan Eropa Timur melalui perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur tentu memiliki keterbatasan, sehingga kajian perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian stabilitas diupayakan NATO melalui perluasan keanggotaannya. Proses dan indikator bagaimana stabilitas dapat tercapai juga perlu dijelaskan agar asumsi yang dihasilkan dari kajian tidak samar.

¹³ Andrew Kydd, "Trust Building, Trust Breaking: The Dilemma of NATO Enlargement", 2001, Massachusetts: The MIT Press

¹⁴ Ibid.

Ketiga, istilah integrasi di dalam tulisan Art sulit untuk diterima karena karakteristik dan kepentingan Rusia dan NATO saling bertentangan. Penulis lebih sepakat kepada penghentian perluasan keanggotaan NATO dan sinergi antara NATO dan Rusia. Sinergi melibatkan Rusia dalam keputusan maupun operasional NATO, namun tidak serta-merta membuat Rusia mempengaruhi NATO maupun sebaliknya.

Keempat, benar bahwa perluasan keanggotaan yang dilakukan NATO akan menciptakan kepercayaan di antara negara-negara Eropa Timur dengan NATO dan merusak kepercayaan di antara NATO dan Rusia. Namun, membiarkan dilema tersebut berlanjut tidak akan menciptakan stabilitas maupun manfaat bagi masing-masing negara.

Selain itu, istilah *filter* atau pembatasan yang digunakan Kydd dalam mendeskripsikan syarat-syarat menjadi anggota NATO bukan solusi terhadap kekhawatiran Rusia.¹⁵ Penulis justru berpendapat sebaliknya, bahwa dengan penetapan syarat-syarat yang eksklusif menyebabkan Rusia dikucilkan karena perbedaannya. Negara-negara Eropa Timur yang berhasil mematuhi persyaratan tersebut semakin memperjelas narasi tesis dan anti-tesis antara NATO dan Rusia. Hasilnya adalah stabilitas semakin sulit tercapai karena perbedaan kepentingan dan persepsi ancaman di antara kedua belah pihak.

¹⁵ Ibid.

1.5. Kerangka Pemikiran

Regional Security Complex Theory (RSCT) diperkenalkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam *Region and Powers: The Structure of International Security*. RSCT menganalisa interaksi antar negara yang berperan sebagai unit dan saling terkoneksi satu dengan yang lain di dalam suatu kawasan sebagai sistemnya. Sebelum memahami RSCT lebih lanjut, definisi kawasan perlu dijelaskan untuk memberikan gambaran dan keselarasan pengertian Eropa Timur menurut penulis dan pengertian yang membaca.

Kawasan yang dimaksud di dalam studi hubungan internasional, memuat konteks yang luas. Kawasan tidak hanya dipahami sebagai kesatuan unit-unit berdasarkan jarak atau geografis, tetapi juga memuat unsur-unsur lain yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas unit tersebut sebagai bagian dari kawasan.¹⁶ Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Shaun Breslin yang mengkaji regionalisme. Ia menemukan bahwa unsur yang membentuk identitas sekelompok negara menjadi sebuah kawasan bukan hanya unsur geografis, tetapi juga meliputi kultur, ekonomi, linguistik, dan hubungan politik. Hal tersebut yang menyebabkan adanya interpretasi seperti sebuah kawasan yang dibentuk dari dua kawasan, atau negara-negara yang tidak memiliki kesamaan kultur namun dikelompokkan ke dalam sebuah kawasan.¹⁷

¹⁶ Shaun Breslin, *Regions and Regionalism in World Politics*, 2010, New York: Palgrave Macmillan

¹⁷ Ibid.

RSCT menggabungkan asumsi dalam Realisme mengenai polaritas dan sistem dan asumsi dalam Konstruktivisme mengenai identitas.¹⁸ Dalam RSCT, polaritas tidak hanya dapat dianalisis dalam level global, tetapi juga dalam level kawasan bahkan sub-kawasan. Buzan mengakui bahwa polaritas tersebut muncul karena fenomena di tiap kawasan di mana ada negara yang memegang peranan dominan di kawasan, namun tidak melampaui kawasan. Polaritas menghasilkan distribusi power untuk membuat negara menjadi *superpower*, *great power*, *regional power*, maupun *lesser power*. Sementara identitas dianggap sebagai penentu perilaku negara ketika berinteraksi dan mengambil peranan di dalam kawasan.

Kompleksitas arsitektur keamanan kawasan yang dipengaruhi oleh masa Perang Dingin dan pasca-Perang Dingin secara langsung berdampak terhadap interaksi antar negara di kawasan.¹⁹ Di dalam interaksi yang dilakukan antar negara terdapat interaksi unit-unit keamanan atau yang dapat diinterpretasikan sebagai *power* menghasilkan karakteristik kawasan. Karakteristik kawasan tersebut diperoleh dari kecenderungan interaksi antar negara yang dapat berpola konflik maupun kerja sama yang dapat dipengaruhi oleh faktor geografis. Karakteristik suatu kawasan juga dapat ditinjau dari sekuritisasi dan de-sekuritisasi terhadap isu keamanan yang berkembang di kawasan tersebut. Isu-isu keamanan yang menghasilkan interaksi berupa konflik, persaingan, maupun kerja sama bersifat eksklusif. Berdasarkan RSCT, interaksi antar negara dibagi menjadi

¹⁸ Barry Buzan dan Ole Waever, "Regions and Powers: The Structure of International Security", 2003, Cambridge: Cambridge University Press

¹⁹ Ibid.

dua, yakni *enmity* dan *amity*. *Enmity* adalah pola hubungan interaksi antar negara yang bersifat konfliktual atau permusuhan, sementara *amity* merupakan pola hubungan interaksi antara negara dalam kawasan yang bersifat kooperatif.

Untuk memudahkan identifikasi kompleksitas keamanan kawasan, Buzan menetapkan empat unsur esensial dalam menentukan pola *amity* dan *enmity*, diantaranya

1. *Boundary*, atau unsur apa yang membedakan suatu kawasan dengan kawasan di sekitarnya
2. Interaksi di dalam struktur anarki
3. Polaritas, mencakup distribusi power dan konfigurasinya di kawasan
4. Konstruksi sosial yang menjelaskan kecenderungan pola *enmity* atau *amity*.

Dalam menilai interaksi negara di dalam kawasan, setiap isu dan unit dalam sistem tidak dapat dianalisis secara sebagian atau tidak dapat dipahami dengan memisahkan satu unit dengan unit lainnya yang saling mempengaruhi. Pola interaksi yang terbentuk akhirnya bersifat interdependensi karena menyadari kondisi yang saling mengikat antar unit-unit di dalam kawasan. Hal ini dapat dilihat dari isu keamanan yang berkaitan dengan masalah geografis bersifat kompleks karena melibatkan identitas, kepentingan, dan kondisi geografis-historis yang membentuk perilaku negara, seperti pola interaksi *enmity* pada Yunani-Turki, Arab-Persia, dan Vietnam-Khmer.²⁰

²⁰ Ibid. 45

Power bagi suatu negara menjadi satu variabel yang penting karena *power* menentukan survivabilitas negara tersebut di dalam sistem. Buzan berpendapat bahwa distribusi *power* yang tidak seimbang diantara negara-negara dalam satu kawasan dapat menyebabkan konflik. Identitas negara, dalam pandangan Buzan, juga berpengaruh terhadap dinamika kawasan.²¹ Dalam hal ini, distribusi *power* dan identitas negara dalam suatu kawasan saling berkaitan. Apabila distribusi *power* di suatu kawasan bersifat unipolar, maka ada satu negara yang memiliki identitas sebagai *regional power*, begitu pula dengan distribusi *power* berupa multipolar dan bipolar.²² Identitas tersebut kemudian memainkan perannya di kawasan.

Dalam jurnal "*Regional powers and security: A framework for understanding order within regional security complexes*", Holsti menambahkan, peranan suatu negara sebagai *regional power* dibagi menjadi tiga, yakni *aggressor*, *defender*, dan *balancer*.²³ Suatu negara berperan sebagai *aggressor* apabila negara tersebut lebih memilih untuk mengesampingkan distribusi *power* yang merata dan memilih untuk menjadi aktor dominan di kawasan dengan meningkatkan *powernya*. Sementara negara yang bersifat *defender* berupaya mempertahankan *status quo*, baik dalam bentuk interaksi berupa konflik maupun kerja sama. Sementara negara yang berperan sebagai *balancer* mengupayakan

²¹ Ibid. 48

²² Derrick Frazier dan Robert Stewart-Ingersoll, "Regional powers and security: A framework for understanding order within regional security complexes", 2010, European Journal of International Relations

²³ Ibid. 740

keseimbangan *power* antara negaranya dengan regional *power* lainnya supaya kondisi *balance of power* dapat tercapai.

Apabila RSCT bermanfaat untuk menganalisis dinamika keamanan di kawasan Eropa Timur, *Democratic Peace Theory* berguna untuk mengidentifikasi bagaimana *open door policy* NATO dapat mewujudkan stabilitas di kawasan. *Democratic Peace Theory* adalah teori yang muncul untuk menjelaskan fenomena rendahnya potensi ataupun kelangkaan bagi sesama negara-negara demokrasi untuk berkonflik. Teori ini awalnya diperkenalkan oleh Michael Doyle di dalam "*Liberalism and World Politics*" dan dikembangkan oleh Bruce Russett dalam "*Grasping the Democratic Peace*". Terdapat tiga fenomena utama dalam teori ini yang saling bertautan, yakni negara-negara demokrasi hampir tidak pernah berperang satu dengan yang lain karena memiliki jalan lain selain perang dalam mengakhiri sebuah konflik, dan setiap negara demokrasi tidak memiliki keinginan untuk berperang karena perang merupakan tindakan yang bertentangan atau dihindari dalam nilai demokrasi.²⁴

Teori awal yang dikemukakan Doyle menekankan moralitas setiap individu yang mulia berdasarkan asumsi dari Kant dan sifat materialisme setiap individu yang tidak pernah puas akan kebutuhan mendorong terjadinya kerja sama dan perdamaian karena saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kedua sifat tersebut teraktualisasi pada pola perilaku negara. Negara yang menurut Doyle sebagai negara liberal atau menurut Schumpeter sebagai negara yang pasifis dan

²⁴ Bruce Russett, "*Grasping the Democratic Peace*", New Jersey: Princeton University Press, hal.

berusaha untuk menghindari peperangan.²⁵ Perundingan atau negosiasi adalah jalan utama yang akan diambil negara untuk mempertahankan perdamaian dan nilai liberal yang dipercaya. Negara demokrasi atau liberal juga akan mempromosikan nilai-nilainya terhadap negara non-demokrasi agar perdamaian tercipta tanpa terkecuali. Dampak dari perdamaian yang dicapai melalui keberadaan negara-negara demokrasi adalah stabilitas keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan terbentuknya aliansi yang saling melindungi satu sama lain.²⁶

Doyle tidak menampik asumsi Kant bahwa konflik akan muncul bila nilai demokrasi yang dipercaya membawa perdamaian tersebut terancam oleh agresi negara lain. Perundingan masih akan dijadikan jalan keluar yang utama, namun apabila kondisi terancam berubah, maka negara demokrasi/liberal akan berusaha mempertahankannya. Inilah yang menyebabkan mengapa hingga sekarang konflik antara negara demokrasi dan non-demokrasi masih tetap terjadi.²⁷

Teori ini mulai sering dimanfaatkan pada periode masa berakhirnya Perang Dingin, ketika terjadi peningkatan jumlah negara demokratis dan peningkatan ekonomi global yang ditengarai merupakan efek dari penerapan demokrasi yang erat hubungannya dengan sistem ekonomi pasar. Rendahnya potensi konflik pada masa tersebut dibandingkan antara konflik pada masa Perang Dunia II dan Perang Dingin di mana masih terdapat negara dengan sistem pemerintahan otoriter dan menganut komunisme di setiap kawasan.²⁸ Jatuhnya

²⁵ Michael Doyle, "*Liberalism and World Politics*", 1986, *The American Political Science Review*, 3

²⁶ Doyle. *ibid.* 7

²⁷ *Ibid.* 9-13

²⁸ *Ibid.* 74

komunisme dan rezim otoriter mengakibatkan rendahnya potensi suatu negara untuk berkonflik akibat perbedaan ideologi dan keberadaan diktator yang irasional.

Sementara dari segi politik domestik, asumsi *Democratic Peace Theory* adalah kondisi di dalam birokrasi pemerintahan yang demokratis setidaknya lebih menjamin pemenuhan kepentingan kelompok yang luas, dibandingkan sistem otoriter yang hanya mengakomodasi kepentingan satu kelompok dan rendahnya mekanisme *check-and-balance* untuk menguji legitimasi pemerintah. Dengan pemenuhan kepentingan di tiap kelompok politik tersebut, pada akhirnya potensi konflik kepentingan dapat dikurangi atau dapat diatasi dengan mekanisme yang kompromis dan adil, seperti negosiasi untuk mencapai konsensus maupun melalui *voting*. Dengan demikian, stabilitas politik domestik akan terjadi karena keberadaan oposisi atau kelompok lain di luar pemerintahan mendapat tempat untuk menyampaikan kepentingan politiknya. Sistem tersebut kemudian akan terefleksikan dalam perilaku negara ketika berinteraksi.²⁹ Negara akan memanfaatkan forum atau organisasi internasional sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, atau mengutamakan dialog. Walaupun kemudian, konflik tidak dapat dihindari, rasionalitas pemimpin yang dilegitimasi akan menciptakan kebijakan luar negeri yang berusaha meminimalisir kerugian.

Kedua teori yang dimanfaatkan penulis, yakni RSCT dan DPT memiliki keserupaan dalam konteks kondisi yang ingin dicapai. Meskipun RSCT tidak secara eksplisit menyebutkan stabilitas, namun kondisi *balance of power* juga

²⁹ Ibid. 86

merupakan bagian dari stabilitas. Stabilitas adalah konsep interdisipliner yang secara umum mengandung tiga unsur yakni *constancy*, *robustness*, dan *resilience*. Keadaan yang konstan mengacu kepada tetapnya sebuah kondisi, dalam artian tidak fluktuatif atau berada tetap pada tempat semula meskipun lingkungannya bersifat dinamis. *Robustness* adalah kemampuan melewati gangguan dan disrupsi tanpa mengalami perubahan. *Resilience* adalah kemampuan untuk mengembalikan kondisi seperti semula setelah sebelumnya terdampak oleh gangguan atau disrupsi.³⁰

Dalam konteks yang lebih sempit, Robert Ayson menjelaskan konsep stabilitas menurut Ilmu Hubungan Internasional, yakni kondisi dimana setiap negara mampu menjaga kedaulatannya dan menjamin tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dan ketika hal tersebut telah tercapai, suatu negara akan mencoba menyesuaikan pola perilaku dan interaksi yang ditunjukkan oleh negara lain. Selain itu, stabilitas juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang menentang adanya konflik atau interaksi yang menghasilkan kerugian di salah satu maupun semua pihak.³¹ Sehingga dalam pengertian tersebut, stabilitas dapat dijadikan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh negara.

Terakhir, untuk memahami fenomena perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh organisasi internasional berbentuk aliansi keamanan kolektif seperti NATO, maka dibutuhkan landasan teoretis. Penulis menggunakan literatur mengenai teori perluasan keanggotaan dalam studi kasus Uni Eropa yang berjudul

³⁰ Sven Ove Hansson dan Gert Helgesson, "*What is Stability?*", 2003, Netherlands: Kluwer Academic Publisher

³¹ Robert Ayson, "*Regional Stability in Asia-Pacific: Towards a Conceptual Understanding*", Asian Security, London: Routledge, 6

“*Theorizing EU Enlargement: research focus, hypotheses, and the state of research*” oleh Frank Schimmelfennig dan Ulrich Sedelmeier. Schimmelfennig dan Sedelmeier menguraikan perluasan keanggotaan yang dilakukan sebuah organisasi internasional sebagai proses institusionalisasi nilai dan norma yang dipegang oleh organisasi internasional terhadap anggota barunya.³² Institusionalisasi yang dilakukan bersifat horizontal, karena nilai dan norma meluas ke negara-negara yang sebelumnya tidak mengenal norma tersebut.

Implementasi nilai dan norma yang dilakukan melalui institusionalisasi terhadap negara anggota baru akan menyebabkan identitas, kepentingan, dan perilaku negara berubah.³³ Asumsi tersebut berasal dari studi kasus Uni Eropa, organisasi supranasional di kawasan Eropa, dimana setiap negara yang bergabung dipastikan untuk menyesuaikan kebijakan negaranya dengan Uni Eropa (UE), sehingga secara perlahan terjadi penyeragaman kebijakan dan perilaku negara meskipun tidak secara keseluruhan.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni strategi penelitian yang dengan pendekatan induktif terhadap pengumpulan data dan teori. Karena penelitian naratif yang dilakukan penulis berupa studi kasus mengenai pencapaian stabilitas Eropa Timur melalui perluasan keanggotaan NATO, maka penulis memerlukan sistematika penelitian. Adapun sistematika metode kualitatif berurutan adalah sebagai berikut,

³² Frank Schimmelfennig dan Ulrich Sedelmeier, “*Theorizing EU Enlargement: research focus, hypotheses, and the state of research*”, 2002, Routledge, 4

³³ Ibid, 8

1. Membuat pertanyaan penelitian dari hasil identifikasi masalah
2. Pembatasan penelitian dan penyaringan sumber yang diperlukan
3. Pengumpulan sumber/data
4. Interpretasi data menggunakan konsep dan teori yang valid
5. Menuliskan temuan penelitian dan kesimpulan³⁴

Data yang dikumpulkan penulis berupa dokumen resmi pemerintah, berita di media massa, tulisan akademik berupa literatur dan jurnal yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian disusun dalam kajian pustaka dan dianalisis oleh penulis menggunakan teori *Regional Security Complex Theory* oleh Barry Buzan dan *Democratic Peace Theory* oleh Michael Doyle dan Bruce Russett. Analisis yang dilakukan penulis akan menghasilkan temuan-temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan membahas pembagian bab-bab dalam penelitian. Penelitian akan dibagi ke dalam empat bab utama, yakni Bab I, II, III, IV.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, kerangka pemikiran, identifikasi masalah, kajian literatur, kerangka pemikiran, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

³⁴ Alan Bryman, "*Social Research Methods 4th Edition*", 2012, Oxford: Oxford University Press

Bab II akan menjelaskan mengenai instabilitas Eropa Timur, *open door policy* NATO yang terbagi atas pendekatan NATO terhadap Eropa Timur dan Rusia, serta bagaimana Rusia menyikapi perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO.

Bab III merupakan pembahasan mengenai perluasan keanggotaan NATO ke negara eks-Soviet di kawasan Eropa Timur yang telah terjadi, dimana Bab IV berusaha menjawab pertanyaan riset mengenai sejauh mana stabilitas kawasan dapat tercapai dengan menghubungkan dinamika kompleksitas keamanan kawasan berdasarkan teori RSCT dan sejauh mana stabilitas tersebut dicapai oleh NATO dengan teori *Democratic Peace Theory*.

Bab IV adalah kesimpulan dari keseluruhan riset yang telah dilakukan sebelumnya.